BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 78 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Watubelah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4355 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Watubelah yang selanjutnya disebut Puskesmas Watubelah adalah UPTD Puskesmas Watubelah.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan adalah merupakan ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat dan persalinan normal bagi Puskesmas yang sudah tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan kesehatan lainya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SPM Kesehatan dimaksudkan untuk memberi pedoman

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada Puskesmas.

(2) SPM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III
TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Tugas Puskesmas

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Watubelah, meliputi :

a. UKP tingkat pertama; dan

b. UKM tingkat pertama.

Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

f. pelayanan persalinan;

g. pelayanan kefarmasi; dan

h. pelayanan laboratorium.

Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;
l. pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
m. pelayanan promosi kesehatan;
n. pelayanan kesehatan lingkungan;
o. pelayanan imunisasi;
p. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
q. pelayanan gizi;
r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
t. pelayanan kesehatan tradisional indera komplementer;
u. pelayanan kesehatan kerja;
v. pelayanan kesehatan olahraga; dan
w. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya.

Pasal 7

(1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Watubelah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada

Puskesmas Watubelah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 9

(1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.

(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 10

(1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
g. pelaksanaan anggaran; dan
h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon

(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

(3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 05 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS WATUBELAH

NO	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Pemeriksaan Umum	1. Kepatuhan SOP petugas	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Penggunaan obat rasional	80%	83%	83%	85%	90%	95%	100%	PJ UKP	
		3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit	80%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Kepuasan pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Tidak terjadi kesalahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

		identifikasi pasien									
2	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Kepatuhan SOP Petugas	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Penggunaan obat rasional	80%	83%	83%	85%	90%	95%	100%	PJ UKP	
		3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Kepuasan pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
3	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP	1. Kepatuhan SOP petugas	80%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Waktu pelayanan kesehatan ibu hamil maksimal 30 menit	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir maksimal 30 menit	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30 menit	80%	90%	98%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Waktu pelayanan kesehatan anak balita maksimal 30 menit	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		6. Waktu pelayanan imunisasi maksimal 30 menit	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		7. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

4	Pelayanan Gawat Darurat	1. Kepatuhan SOP petugas	100%	97,5%	98%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Pelayanan berdasarkan TRIASE pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		3. Kepuasan pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
5	Pelayanan Gizi yang bersifat UKP	1. Kepatuhan SOP petugas	100%	97,5%	98%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Waktu pelayanan pemantauan pertumbuhan balita dan pemantauan status gizi maksimal 30 menit	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		3. Waktu pelayanan Konseling	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

		Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) maksimal 30 menit									
		4. Kepuasan pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
6	Pelayanan persalinan	1. Kebutuhan SOP petugas	100%	81%	84%	90%	95%	100%	100%	PJ UKP	
		2. Pelayanan persalinan dilakukan oeh dokter da bidan atau 2 orang bidan atau perawat dan bidan	80%	85%	88%	95%	100%	100%	100%	PJ UKP	

		3. Pelayanan kesehatan persalinan dilakukan mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	100%	100%100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30 menit	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
7	Pelayanan Kefarmasian	1. Kepatuhan SOP petugas	100%	80%	85 %	90 %	95 %	100%	100%	PJ UKP	

		2. Waktu penyiapan obat non racikan <15 menit, obat racikan <25 menit	80%	85%	90 %	95%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		3. Pemberian Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		4. Kepuasan pasien	80%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
8	Pelayanan Laboratorium	1. Kepatuhan SOP Petugas	100%	60%	65%	70%	80%	90%	100%	PJ UKP	
		2. Waktu pemeriksaan sampel maksimal 60 menit	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	
		3. Kepuasan pasien	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

		4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKP	

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS WATUBELAH

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal 2018	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	97,1%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai	100%	97,42%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		standar									
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	82%	83%	90%	95%	98%	100%	PJ UKM	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita usia 12 –59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	90%	90,9%	97%	98%	100%	100%	PJ UKM	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	78,58%	92,9%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40%	80,6%	82%	85%	90%	100%	PJ UKM	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Warga Negara berusia 60 tahun atau keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	28,8%	30,4%	60%	80%	90%	100%	PJ UKM	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi usia >15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	60%	61,5%	80%	85%	90%	100%	PJ UKM	

9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	Penderita diabetes melitus usia >15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	15%	35%	50%	60%	80%	100%	PJ UKM	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45%	55%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	26,4%	42,1%	70%	80%	90%	100%	PJ UKM	

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	60%	65,9%	70%	80%	90%	100%	PJ UKM	
13	Pelayanan Promosi Kesehatan	Penyuluhan PHBS di sekolah	100%	78,5%	80%	85%	90%	100%	100%	PJ UKM	
		Penyuluhan PHBS pada keluarga	100%	55%	80,7%	85%	90%	100%	100%	PJ UKM	
		Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		Pemberdayaan individu/keluarga melalui kunjungan rumah	100%	83,4%	71,9%	80%	85 %	90%	100%	PJ UKM	
		Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga	100%	55%	82%	85%	90 %	95%	100%	PJ UKM	
		Pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui presentasi strata desa siaga aktif	60%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	PJ UKM	
		Pembinaan UKBM dilihat melalui presentasi posyandu strata purnama dan mandiri	65%	60,7%	82,1%	85%	90 %	95%	100%	PJ UKM	

		Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektoral	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	PJ UKM	
		Penggalangan kemitraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Orientasi promosi kesehatan bagi kader	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
14	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)	100%	72%	86,9%	90%	90%	100%	100%	PJ UKM	
		Penduduk terhadap akses air minum yang berkualitas (memenuhi syarat)	100%	80%	83,4%	85%	90%	100%	100%	PJ UKM	

		Pemicuan 5 pilar STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih	80%	87,2%	94,1%	95%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat fasilitas umum	75%	87,2%	91,4%	95%	100%	100%	100%	PJ UKM	
15	Pelayanan Imunisasi	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	93%	95%	95,8%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Bias DT	95%	96,6%	98,5%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Bias Td	95%	97%	98,5%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		Bias Campak	95%	95,7%	98,5%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Imunisasi TT2+ ibu hamil	90%	98,9%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
16	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Posbindu PTM	100%	85,7%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Penanganan kasus kelainan refraksi	100%	98,7%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Penanganan penyakit katarak	100%	30%	30%	50%	70%	80%	100%	PJ UKM	
		Penemuan penderita pneumonia balita	86%	74,1%	75,4%	80%	90%	95%	100%	PJ UKM	
		Pelayanan diare pada kasus semua umur	100%	21,7%	20,4%	80%	90%	95%	100%	PJ UKM	
		Pencegahan DBD dengan angka bebas jentik	95%	96,3%	91,7%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Kesembuhan kasus kusta MB	100%	12,5%	44,4%	50%	60%	80%	100%	PJ UKM	

		Pelayanan penderita filariasis	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
17	Pelayanan Gizi	ASI eklusif	100%	50%	53,6%	70%	80%	90%	100%	PJ UKM	
		Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapatkan makanan tambahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Balita kurus mendapatkan makanan tambahan	90%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
18	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Keluarga resiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Kelompok resiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Masyarakat/Desa mendapatkan asuhan keperawatan komunitas	100%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Keluarga mandiri III dan IV pada semua kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

19	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Pembinaan kesehatan gigi masyarakat di Desa (UKGMD)	80%	58,9%	98,2%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI (UKGS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada siswa SD/MI	100%	77,2%	83,8%	85%	90%	95%	100%	PJ UKM	
		Penanganan siswa SD/MI yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi	100%	100%	81,3%	85%	90%	95%	100%	PJ UKM	
20	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pembinaan penyehat tradisional	80%	12,5%	40%	60%	80%	90%	100%	PJ UKM	

	Komplementer	Pembinaan kelompok pemanfaatan Tanaman Obat dan Keluarga (TOGA)	100%	33,3%	50%	60%	80%	90%	100%	PJ UKM	
21	Pelayanan Kesehatan Kerja	Pembinaan pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
22	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Pengukuran kebugaran jasmani jema'ah haji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
23	Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainya	Ketepatan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		Kelengkapan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Ketepatan laporan surveylans terpadu penyakit	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Kelengkapan laporan surveylans terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada KLB	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	PJ UKM	

		terdampak krisis kesehatan akibat bencana									

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR SPM UKP

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Judul	Pelayanan pemeriksaan umum
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien berusia >5 tahun mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan pemeriksaan umum adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada pasien usia >5 tahun dengan keluhan penyakit umum sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan SOP petugas 2. Penggunaan obat rasional 3. Waktu pelayanan maksimal 15 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien berusia >5 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register pemeriksaan umum
Target	100% pasien pemeriksaan umum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan, penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan,penyuluhan

	kesehatan, pemberian resep dan pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Petugas pemeriksaan umum

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yangg memerlukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien gigi dan mulut sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan SOP petugas 2. Penggunaan obat rasional 3. Waktu pelayanan tindakan maksimal 30 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien gigi dan mulut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan gigi dan mulut dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, penyuluhan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep, dan pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Dokter gigi/penanggung jawab pelayanan kesehatan gigi dan mulut

3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan kesehatan keluarga yang besifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien yangg memerlukan pelayanan kesehatan keluarga mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu dan anak serta balita sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan SOP petugas 2. Waktu pelayanan KB MKJP maksimal 30 menit 3. Waktu pelayanan imunisasi maksimal 30 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien kesehatan keluarga yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pasien kesehatan keluarga dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan kesehatan keluarga
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, penyuluhan kesehatan, tindakan yang diperlukan, pemberian resep, pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Bidan Puskesmas

4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	Pelayanan gawat darurat
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien gawat darurat mendapat pelayanan kesehatan kegawatdaruratan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan kasus kegawatdaruratan sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan SOP petugas 2. Pelayanan berdasarkan triase pasien 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien pelayanan gawat darurat mendapat pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah pasien pelayanan gawat darurat mendapat pelayanan kegawatdaruratan dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan pelayanan gawat darurat
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Triase, penanganan kegawatdaruratan, rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Petugas pelayanan gawat darurat

5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Judul	Pelayanan gizi yang bersifat UKP
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua pasien berusia 0-59 bulan yang memerlukan pelayanan gizi, mendapat pelayanan sesuai standar
Definisi	Pelayanan gizi yang bersifat UKP adalah pelayanan

Operasional	kesehatan yang diberikan kepada pasien usia 0-59 bulan sesuai standar, meliputi : 1. Kepatuhan SOP petugas 2. Waktu pelayanan pemantauan pertumbuhan status gizi maksimal 30 menit 3. Waktu pelayanan konseling Pemberian Makanan pada Anak (PMBA) maksimal 30 menit 4. Kepuasan pasien 5. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien pelayanan gizi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kunjungan pelayanan gizi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi pelayanan gizi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemantauan pertumbuhan balita, pemantauan status gizi, penyuluhan Kesehatan dan pemberian resep bila perlu
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Petugas gizi

6. Pelayanan Persalinan

Judul	Pelayanan persalinan
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Semua ibu bersalin mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

	memiliki kompetensi minimal 2 orang, meliputi : a. Persalinan normal b. Persalinan komplikasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Formulir partograf, kartu ibu/rekam medis, nuku KIA
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu bersalin, pelayanan persalinan, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu dan kohort ibu, dan rujukan persalinan jika diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Bidan koordinator KIA

7. Pelayanan Kefarmasian

Judul	Pelayanan kefarmasian
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Ketersediaan dan pelayanan obat sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan pemberian obat sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan SOP waktu penyiapan obat non racikan <15 menit dan obat racikan < 25 menit 2. Pemberian Informasi Obat (PIO) 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah resep pasien yang dilayani sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah resep obat yang masuk dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Rekapitulasi penggunaan obat rasional
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Menerima resep, penyediaan obat, pemberian obat kepada pasien sesuai identitas, menjelaskan pemakaian obat
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Petugas Farmasi

8. Pelayanan Laboratorium

Judul	Pelayanan laboratorium
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Pasien yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan laboratorium mendapat pelayanan laboratorium sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan penunjang diagnosa menggunakan sediaan spesimen yang dibutuhkan sesuai standar meliputi : 1. Kepatuhan SOP 2. Petugas waktu pemeriksaan sampel maksimal 60 menit 3. Kepuasan pasien 4. Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode	Setiap bulan

Numerator	Jumlah pemeriksaan laboratorium sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register pelayanan laboratorium
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengambilan/penerimaan spesimen, pemeriksaan dengan menggunakan regen dan alat sesuai standar, pencatatan hasil pemeriksaan, pemberian hasil pemeriksaan kepada pasien
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Petugas Laboratorium

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TANGGAL : 05 OKTOBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WATUBELAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR SPM UKM

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Tergambarnya kemampuan pusksemas dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal minimal empat kali selama kehamilan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu meliputi : a. Standar kualitas (kunjungan 4 kali selama periode kehamilan K4) b. Standar kuantitas (pelayanan antenatal memenuhi 10T)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu hamil yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kartu ibu, kohort dan buku KIA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu hamil, pemeriksaan antenatal, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu dan kohort dan rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Semua ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di fasilitas pelayanan Kesehatan
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan minimal 2 orang, meliputi : a. Persalinan normal b. Persalinan komplikasi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Formulir partograf, kartu ibu/rekam medis, buku KIA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan ibu bersalin, pelayanan persalinan, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu dan kohort ibu, dan rujukan persalinan jika diperlukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Judul	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah

	cakupan bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi : a. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: 1). Kunjungan neonatal 1 (6-48 jam) 2). Kunjungan neonatal 2 (3-7 hari) 3). Kunjungan neonatal 3 (8-28 hari) b. Standar kualitas meliputi : 1). Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) 2). Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari) c. Kunjungan neonatal (KN3)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi baru lahir yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, buku KIA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan dan pelaporan dan rujukan pertolongan kasus koplikasi pada bayi baru lahir
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA, dan koordinator MTBM

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Judul	Pelayanan kesehatan balita
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Semua balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah cakupan kumulatif anak umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar meliputi : a. Pelayanan kesehatan balita sehat b. Pelayanan kesehatan balita sakit
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kumulatif balita umur 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah balita umur 12-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Kuisioner pra skrining, formulir DDTK, buku KIA
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan balita 0-59 bulan, pelayanan kesehatan balita, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pencatatan dan pelaporan, dan pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab	Koordinator KIA, koordinator MTBM, koordinator MTBS dan Nutrisionis

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang meliputi: a. Skrining kesehatan b. Tindak lanjut hasil skrining Kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali

Periode Analisa	Satu tahun sekali
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuisioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah dan formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah di luar sekolah
Target	100%
Langkah Kegiatan	Koordinasi dan pendataan sasaran, pelaksanaan skrining kesehatan, tindak lanjut hasil skrining, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi operasional	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan pada warga negara usia 15-59 tahun yang meliputi : a. Edukasi kesehatan termasuk KB b. Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar yang

	ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Pedoman dan media KIE, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SI PTM)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor risiko PTM, konseling tentang faktor risiko PTM, pelayanan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pencatatan pelaporan faktor risiko PTM
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Judul	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Agar setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah setiap warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi : a. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat b. Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh warga Negara usia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku kesehatan lansia

Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran lansia, skrining kesehatan lansia, pencatatan pelaporan, pemberian buku kesehatan lansia dan pelayanan rujukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program usia lanjut

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Pengukuran tekanan darah b. Edukasi c. Penatalaksanaan hipertensi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita hipertensi usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun yang berada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining penderita hipertensi, penemuan kasus hipertensi untuk seluruh pasien >15 tahun di fasilitas kesehatan tingkat pertama, melakukan pelayanan sesuai standar berupa edukasi untuk

	mengubah gaya hidup dan kepatuhan minum obat dan/atau terafi farmakologi, melakukan rujukan ke FKRTL sesuai kriteria
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Judul	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus adalah jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Pengukuran gula darah b. Edukasi c. Terafi farmakologi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita Diabetes Melitus usia >15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia >15 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM, pedoman dan media KIE
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining penderita Diabetes Melitus, melakukan pelayanan sesuai standar berupa edukasi tentang diet makanan dan aktifitas fisik serta terafi farmakologi, melakukan rujukan penyediaan peralatan kesehatan Diabetes Melitus, penyediaan obat, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan

	evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat adalah pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi: a. Pemeriksaan kesehatan jiwa b. Edukasi
Frekuensi pengumpulan data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku pedoman diagnosis gangguan jiwa, buku pedoman penggolongan gangguan jiwa, formulir pencatatan dan pelaporan dan media KIE
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penderita orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan data estimasi, melakukan diagnosis terduga orang dengan gangguan jiwa berat dan melakukan pinata laksanaan medis, melaksanakan kunjungan rumah dan melakukan rujukan pada FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
Penanggung Jawab	Penanggung jawab upaya kesehatan jiwa

11. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas kesehatan
Tujuan	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan (TB) sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) adalah Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Pemeriksaan klinis dan penunjang (CDR dan CNR) b. Edukasi dan penatalaksanaan Tuberkulosis termasuk rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TB) yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TB) dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Formulir pencatatan dan pelaporan TB, pedoman/standar operasional prosedur
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, pengobatan, edukasi dan rujukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program TB

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang berisiko terinfeksi mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasioonal	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah orang beresiko terinfeksi HIV

	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi : a. Edukasi perilaku beresiko b. Skrining
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu dua kali
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang datang ke Puskesmas dan mendapatkan pelayanan sesuai standar yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Media KIE, rekam medis
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pemetaan penemuan kelompok sasaran, promosi kesehatan dan penyuluhan, jejaring kerja dan kemitraan, sosialisasi pencegahan, pemeriksaan deteksi dini HIV, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja, dan rujukan jika diperlukan
Penanggung Jawab Pengumpul data	Penanggung jawab program HIV

13. Pelayanan Promosi Kesehatan

Judul	Penyuluhan PHBS di sekolah
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Menyampaikan informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan sekolah
Definisi Operasional	Penyuluhan PHBS di sekolah adalah kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas/mitra kerja Puskesmas secara berkelompok dengan sasaran siswa, guru dan masyarakat sekolah, tujuannya adalah agar tahu, mau dan mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat,

	dilaksanakan setiap triwulan terintegrasi dengan kegiatan penjaringan sekolah, didukung alat bantu/media penyuluhan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap triwulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah sekolah yang mendapatkan penyuluhan PHBS yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sekolah yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku pedoman penyelenggaraan PHBS, data sekolah, data siswa, Catatan lengkap (daftar hadir, materi, pembicara), Register penyuluhan dan Jadwal
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Penyuluhan PHBS di keluarga
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Menyampaikan informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga
Definisi Operasional	Penyuluhan PHBS di Keluarga adalah kegiatan penyampaian informasi oleh petugas Puskesmas/mitra kerja Puskesmas dengan sasaran keluarga dan anggotanya yang mendapat intervensi PIS/PK atau keluarga yang tidak ber PHBS, didukung alat bantu/media penyuluhan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap triwulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah keluarga yang mendapatkan penyuluhan PHBS yang ada di wilayah kerja dalam kurun

	waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran intervensi PIS/PK yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku pedoman penyelenggaraan PHBS, data PIS/PK, data keluarga, Catatan lengkap (daftar hadir, materi, pembicara), register penyuluhan, dan Jadwal penyuluhan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Menyampaikan informasi tentang kesehatan jiwa masyarakat dan napza sehingga masyarakat dapat berkontribusi pro aktif kepada berbagai usaha kesehatan jiwa melalui penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza
Definisi Operasional	Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza adalah penyampaian informasi kesehatan jiwa masyarakat dan napza kepada sasaran masyarakat secara berkelompok (5-30 orang) yang dilaksanakan oleh petugas Puskesmas
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Buku pedoman penyelenggaraan kesehatan jiwa Catatan lengkap (daftar hadir, materi, pembicara), Register penyuluhan dan jadwal kegiatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Menyiapkan sasaran, materi, tempat, pelaksanaan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan napza melalui ceramah, diskusi dan simulasi, evaluasi kegiatan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Pemberdayaan individu melalui kunjungan rumah
Dimensi Mutu	Kualitas dan kualitas
Tujuan	Seluruh sasaran yang mendapatkan KIP/K
Definisi Operasional	Pemberdayaan individu melalui kunjungan rumah adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan berupa kunjungan rumah sebagai tindak lanjut upaya promosi kesehatan di dalam gedung puskesmas kepada pasien/keluarga yang karena masalah kesehatannya memerlukan pembinaan lebih lanjut dengan metoda KIP/K, didukung alat bantu/media penyuluhan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rumah yang dikunjungi oleh petugas Puskesmas yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh sasaran KIP/K di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Register kunjungan pasien, data PIS/PK, Catatan lengkap (menjawab 5W 1H), buku visum, nama pasien/Kepala Keluarga yang dikunjungi, tanggal kunjungan, materi KIP/K
Target	100%

Langkah Kegiatan	Persiapan data sasaran, format kunjungan rumah, pelaksanaan kunjungan rumah evaluasi kegiatan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Agar keluarga tahu dan mampu menolong diri sendiri dibidang kesehatan dengan menerapkan PHBS dan berperan aktif dalam menjaga Kesehatan
Definisi Operasional	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga adalah pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dengan melihat 10 indikator, meliputi : linakes, memberi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita setiap bulan, menggunakan, air bersih, mencuci tangan dengan sabun & air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik, tidak merokok di dalam rumah pada setiap rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Pembuktian dengan : adanya data hasil kajian PHBS RT, adanya hasil analisis, rencana dan jadwal tindak lanjut dari hasil kajian
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rumah tanga ber PHBS yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah seluruh rumah tangga di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku pedoman/juknis penyelenggaraan PHBS, data PIS/PK dan data keluarga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait,

	pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui persentasi strata Desa Siaga Aktif
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan strata Purnama dan Mandiri
Definisi Operasional	Pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat melalui persentasi strata Desa Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan strata Purnama dan Mandiri
Frekuensi pengumpulan data	Setiap triwulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan siaga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data Desa/Kelurahan dan Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif, mapping strata, rencana intervensi peningkatan strata
Target	60%
Langkah Kegiatan	Persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pendekatan pengembangan Desa siaga, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan peningkatan
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Promkes

Judul	Pembinaan UKBM dilihat melalui persentasi posyandu strata Purnama dan Mandiri
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan strata posyandu Purnama dan Mandiri di wilayah kerja
Definisi Operasional	Pembinaan UKBM dilihat melalui persentasi

	posyandu strata purnama dan mandiri adalah pembinaan UKBM Posyandu dalam meningkatkan strata posyandu menjadi Purnama dan Mandiri. Posyandu Purnama adalah posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatannya utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan, dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% kepala keluarga di wilayah kerja posyandu. Posyandu Mandiri adalah posyandu yang dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mempunyai kegiatan tambahan lebih dari 2 kegiatan serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% kepala keluarga yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah posyandu Purnama dan Mandiri yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun
Denominator	Jumlah seluruh posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Data strata posyandu, SK Pokjanal Kecamatan, SK Pokja Desa/Kelurahan
Target	65%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektoral
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Menyampaikan informasi promosi kesehatan atau perubahan kebijakan program kesehatan serta mendapatkan dukungan dari lintas sectoral
Definisi Operasional	Kegiatan advokasi yang dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas dengan sasaran kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat, Lintas Sektor, dilakukan minimal (satu) kali dalam satu bulan, guna mendapatkan komitmen/dukungan kebijakan/anggaran dalam bidang Kesehatan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kegiatan advokasi Puskesmas kepada Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas Sektoral
Denominator	12 kali dalam satu tahun
Sumber Data	Buku visum, substansi advokasi, nama petugas yang mengadvokasi, tanggal pelaksanaan kegiatan, hasil advokasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Penggalangan kemitraan
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Terjalin kerjasama kemitraan dengan mitra kerja (unsur pemerintahan : Lintas Program, swasta/dunia usaha, LSM dan organisasi massa, organisasi profesi)
Definisi Operasional	Penggalangan kemitraan adalah kegiatan-kegiatan

	kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas di luar gedung dengan mitra kerja (unsur pemerintahan : Lintas Program, swasta/dunia usaha, LSM dan organisasi massa, organisasi profesi), dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kegiatan Puskemas luar gedung yang dilakukan dengan mitra kerja
Denominator	12 kali dalan satu tahun
Sumber Data	Nama kegiatan, petugas yang melaksanakan, nama mitra kerja, buku visum
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

Judul	Orientasi promosi kesehatan bagi kader
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Definisi Operasional	Orientasi promosi kesehatan bagi kader adalah Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader dalam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan dalam waktu tertentu dengan alokasi anggaran baik dari Puskesmas maupun dari mitra kerja serta dari anggaran lainnya., notulen/laporan kegiatan
Frekuensi pengumpulan data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah kader yang mendapatkan orientasi

	promosi kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kader di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Nama kader yang diorientasi, tanggal pelaksanaan kegiatan, dokumentasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab promkes

14. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Judul	Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)
Definisi Operasional	Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah adalah persentase penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak (jamban sehat) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Data penduduk akses jamban sehat
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan

Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan lingkungan

Judul	Penduduk terhadap akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Meningkatkan akses terhadap akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat
Definisi Operasional	Penduduk terhadap akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat adalah persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah penduduk dengan akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Data penduduk akses air minum yang berkualitas/memenuhi syarat
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan lingkungan

Judul	Pemicuan 5 pilar STBM
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
Definisi Operasional	Pemicuan 5 pilar STBM adalah jumlah desa yang melaksanakan STBM di wilayah Puskesmas setiap tahunnya, dimana Desa/Kelurahan yang melaksanakan ditandai desa tersebut sudah melakukan pemicuan minimal 1 dusun/RW,

	adanya rencana kerja, masyarakat (RKM) dan adanya natural leader
Frekuensi pengumpulan data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Rencana kerja masyarakat (RKM) dan adanya natural leader
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan (waktu, tempat, jadwal, sasaran, materi), koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan lingkungan

Judul	Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada sarana air bersih
Definisi Operasional	Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada sarana air bersih
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah IKL yang dilaksanakan terhadap sarana air bersih di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah seluruh sarana air bersih di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Panduan sistem surveilans sarana air bersih dan sanitasi, laporan inspeksi sanitasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan kepemilikan dan pemanfaatan sarana air bersih, menentukan lokasi, jenis sarana air bersih yang akan di inspeksi, melakukan inspeksi sarana air bersih sesuai dengan jenisnya, pencatatan, menentukan faktor risiko, menyampaikan hasil inspeksi sarana air bersih kepada pengguna, tindak lanjut perbaikan terhadap hasil inspeksi sarana air bersih dengan risiko tinggi, pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan lingkungan

Judul	Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat fasilitas umum
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kontinuitas
Tujuan	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada tempat fasilitas umum
Definisi Operasional	Inspeksi kesehatan lingkungan terhadap tempat fasilitas umum adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat pada tempat fasilitas umum
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah IKL yang dilaksanakan terhadap sarana tempat fasilitas umum di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.
Denominator	Jumlah seluruh sarana tempat fasilitas umum di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Panduan sistem surveilans sarana tempat fasilitas umum dan sanitasi, laporan inspeksi sanitasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan kepemilikan dan pemanfaatan sarana tempat fasilitas umum, menentukan lokasi, jenis sarana tempat fasilitas umum yang akan di inspeksi, melakukan inspeksi sarana tempat fasilitas umum sesuai dengan jenisnya, pencatatan, menentukan faktor risiko, menyampaikan hasil inspeksi sarana tempat fasilitas umum kepada pengguna, tindak lanjut perbaikan terhadap hasil inspeksi sarana air bersih dengan risiko tinggi, pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab Kesehatan Lingkungan

15. Pelayanan Imunisasi

Judul	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Dimensi Mutu	kuantitas dan kualitas
Tujuan	≥ 80 % dari jumlah bayi yang ada di Desa/Kelurahan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap
Definisi Operasional	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/Kelurahan dimana ≥ 80 % dari jumlah bayi yang ada di Desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yang ada di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan Imunisasi

Target	93%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

Judul	Imunisasi dasar Lengkap (IDL)
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan cakupan bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Definisi Operasional	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah bayi yang ada di wilayah kerja tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi mendapat imunisasi dasar lengkap yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh bayi ada di wilayah Kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan imunisasi
Target	93%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, menentukan jenis vaksin yang diberikan, pemberian vaksinasi, pencatatan laporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

Judul	Bias DT
Dimensi Mutu	keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit Difteria Tetanus pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar
Definisi Operasional	BIAS DT adalah jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi DT
Frekuensi Pengumpulan Data	1 kali

Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang mendapatkan imunisasi Bias DT yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	95%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan logistik, pelaksanaan BIAS, pencatatan, sweefing dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

Judul	Bias Td
Dimensi Mutu	keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit Tenatus Difteria pada siswa kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar
Definisi Operasional	BIAS Td adalah Jumlah siswa kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi Td
Frekuensi Pengumpulan Data	1 kali
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah siswa kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar (SD) yang mendapatkan imunisasi Bias Td yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh siswa kelas 2 dan 3 Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	95%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan logistik, pelaksanaan BIAS, pencatatan, sweeping dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

Judul	Bias Campak
Dimensi Mutu	keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit Campak pada siswa kelas 1 Sekolah Dasar
Definisi Operasional	BIAS Campak adalah Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi Campak
Frekuensi Pengumpulan Data	1 kali
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang mendapatkan imunisasi Bias Campak yang di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan BIAS
Target	95%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan logistik, pelaksanaan BIAS, pencatatan, sweeping dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

Judul	Imunisasi TT2+ ibu hamil
Dimensi Mutu	keselamatan dan kuantitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit Tetanus pada ibu hamil
Definisi Operasional	Imunisasi TT2+ ibu hamil adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT ke-dua atau ke-tiga, atau ke-empat atau ke-lima di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	4 kali
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi TT2, TT3, TT4 dan TT5 di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan imunisasi
Target	90%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan vaksin dan logistik, pelaksanaan imunisasi, pencatatan, sweefing dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program imunisasi

16. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Judul	Pelayanan posbindu PTM
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM
Definisi Operasional	Pelayanan posbindu PTM adalah persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit tidak menular

Judul	Penanganan kasus kelainan refraksi
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Setiap orang penderita kelainan refraksi mendapatkan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Penanganan kasus kelainan refraksi adalah orang dengan kelainan refraksi ditangani sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kasus kelainan refrasi yang ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus kelainan refraksi yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit PTM kesehatan indra
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM kesehatan indera

Judul	Penanganan penyakit katarak
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Setiap orang penderita penyakit katarak mendapatkan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Penanganan penyakit katarak adalah orang dengan penyakit katarak ditangani sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kasus penyakit katarak yang ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus penyakit katarak yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit PTM kesehatan indera
Target	100%

Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan Pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM kesehatan indera

Judul	Penemuan penderita pneumonia balita
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar
Definisi Operasional	Penemuan penderita pneumonia balita adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita pneumonia balita yang di tangani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	86%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, pencatatan Pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit menular

Judul	Pelayanan diare pada kasus semua umur
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Penderita diare semua umur yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan diare pada kasus semua umur adalah jumlah penemuan kasus diare pada semua umur yang mendapatkan pelayanan/pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penderita diare semua yang ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah target penemuan penderita diare yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	86%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit menular

Judul	Pencegahan DBD dengan angka bebas jentik
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Pencegahan DBD dengan angka bebas jentik pada rumah dan tempat-tempat umum
Definisi Operasional	Pencegahan DBD dengan angka bebas jentik adalah persentasi rumah atau tempat-tempat umum yang diperiksa jentik dan bebas jentik
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik dan bebas jentik di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	95%
Langkah Kegiatan	Validasi jumlah sasaran, koordinasi pemeriksaan jentik, sosialisasi, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit menular

Judul	Kesembuhan kasus kusta MB
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Penderita kasus kusta MB yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar dan menyelesikan pengobatan
Definisi Operasional	Kesembuhan kasus kusta MB adalah jumlah kasus baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah kasus baru MB dari periode kohort satu tahun yang sama menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan) di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kasus baru kusta MB yang mulai MDT yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, Pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit menular

Judul	Pelayanan penderita filariasis
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua penderita filariasis yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan penderita filariasis adalah persentasi kasus filariasis yang dilakukan tatalaksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah penderita filariasis yang dilakukan tatalaksana filariasis di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penderita filariasis yang ditemukan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan penyakit menular
Target	100%
Langkah Kegiatan	Validasi kasus, koordinasi penanganan kasus, pengobatan dan perawatan, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi.
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program penyakit menular

17. Pelayanan Gizi

Judul	Asi eklusif
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua bayi sampai umur 6 bulan diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir
Definisi Operasional	Asi eklusif Bayi sampai umur 6 bulan diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral sejak lahir
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah bayi kurang mencapai umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI eklusif 6 bulan di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah bayi mencapai umur 5 bulan 29 hari yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan gizi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Data sasaran, konseling, penyuluhan, pembinaan, dan pemantauan sesuai standar
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

Judul	Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
Dimensi Mutu	kualitas dan kuantitas
Tujuan	Semua ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilanya
Definisi Operasional	Ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) adalah ibu hamil mendapat 90 tablet tambah darah selama kehamilan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet tambah darah selama masa kehamilan di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan gizi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan tablet tambah darah, pemberian, konseling, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

Judul	Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)
Dimensi Mutu	kualitas dan kuantitas
Tujuan	Semua remaja putri usia 12-18 tahun mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 1 tablet rutin setiap minggu
Definisi Operasional	Remaja putri mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) adalah remaja putri usia 12-18 tahun mendapat tablet tambah darah secara rutin setiap minggu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap triwulan
Periode Analisa	Setiap tahun

Numerator	Jumlah remaja putri usia 12-18 tahun yang mendapatkan tablet tambah darah di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh remaja putri yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan gizi
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, menyiapkan tablet tambah darah, pemberian, konseling, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

Judul	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapatkan makanan tambahan
Dimensi Mutu	kualitas dan kuantitas
Tujuan	Semua ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan sebagai tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan tambahan bahan pangan local
Definisi Operasional	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapatkan makanan tambahan adalah ibu hamil dengan lingkar lengan atas <23.5 cm mendapatkan makanan tambahan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil KEK yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan gizi
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemeriksaan fisik ibu hamil,

	menyiapkan makanan tambahan, pemberian, konseling, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

Judul	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan
Dimensi Mutu	kualitas dan kuantitas
Tujuan	Semua balita gizi kurus mendapatkan makanan tambahan sebagai tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan atau makanan tambahan bahan pangan local
Definisi Operasional	Balita kurus mendapatkan makanan tambahan adalah balita usia 6 bulan 0 hari sampai 59 bulan 29 hari dengan status gizi kurus (BB/PB atau BB/TB – 3 SD sampai dengan 2 SD)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah balita gizi kurus yang mendapatkan makanan tambahan di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh balita gizi kurus yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan gizi, laporan pemantauan tumbuh kembang balita
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, menetapkan status gizi balita, menyiapkan makanan tambahan, pemberian, konseling, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

Judul	Kasus balita gizi buruk mendapatkan perawatan
Dimensi Mutu	keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua balita gizi buruk yang ada di wilayah kerja

	mendapatkan perawatan
Definisi Operasional	Kasus balita gizi buruk mendapatkan perawatan adalah anak berumur dibawah 5 tahun (0-59 bulan 29 hari) dengan tanda klinis gizi buruk dan atau indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai Z-Score < 3SD mendapatkan perawatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh balita buruk yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan bulanan gizi, laporan pemantauan tumbuh kembang balita
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, menetapkan status gizi balita, kunjungan rumah, konseling, monitoring, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab gizi

18. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Judul	Keluarga risiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan
Dimensi Mutu	Kualitas dan kualitas
Tujuan	Semua keluarga risiko tingi mendapatkan asuhan keperawatan sesuai standar
Definisi Operasional	Keluarga risiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan adalah keluarga mendapatkan asuhan keperawatan keluarga dan terdokumentasikan melalui asuhan keperawatan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan

	termasuk tindak lanjut permasalahan pada indikator program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah keluarga yang mendapatkan asuhan keperawatan keluarga di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran keluarga yang bermasalah kesehatan dan tercatat dalam register R1 perkesmas yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data PIS-PK, Register R1 Perkesmas, asuhan keperawatan keluarga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan data keluarga dari data PIS-PK, penjadwalan kunjungan, pelaksanaan kunjungan rumah, pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan keluarga, intervensi, evaluasi, tindak lajut, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab perkesmas

Judul	Kelompok risiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua kelompok risiko tingi mendapatkan asuhan keperawatan sesuai standar
Definisi Operasional	Kelompok risiko tinggi mendapatkan asuhan keperawatan adalah kelompok risiko tinggi (prolanis, kelompok ibu hamil resiko tinggi, balita risiko tinggi, dll) mendapatkan asuhan keperawatan kelompok oleh petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok resti yang mendapatkan asuhan

	keperawatan keluarga di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kelompok risiko tinggi yang ada dan tercatat dalam buku register kelompok risiko tinggi yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Buku register kelompok resti, asuhan keperawatan kelompok
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan data kelompok risiko tinggi, penjadwalan kunjungan, pelaksanaan kunjungan kelompok, pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan kelompok, intervensi, evaluasi, tindak lajut, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab perkesmas

Judul	Masyarakat Desa/Kelurahan mendapatkan asuhan keperawatan komunitas
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua Desa/Kelurahan atau RW atau RT mendapatkan asuhan keperawatan sesuai standar
Definisi Operasional	Masyarakat Desa/Kelurahan mendapatkan asuhan keperawatan komunitas adalah asuhan keperawatan komunitas ke Desa/Kelurahan atau RW atau RT oleh petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Desa/Kelurahan atau RW atau RT mendapatkan asuhan keperawatan komunitas di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah Desa/Kelurahan atau RW atau RT minimal 1 kali mendapatkan asuhan keperawatan komunitas
Sumber Data	Desa/Kelurahan atau RW atau RT, register asuhan keperawatan komunitas
Target	100%

Langkah Kegiatan	Pengumpulan data Desa/Kelurahan atau RW atau RT sesuai dengan permasalahan yang ada, penjadwalan kunjungan, pelaksanaan kunjungan, pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan komunitas, intervensi, evaluasi, tindak lanjut, monitoring, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab perkesmas

Judul	Keluarga mandiri III dan IV pada semua kasus
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua keluarga rawan yang di bina memenuhi kriteria hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan IV)
Definisi Operasional	Keluarga mandiri III dan IV pada semua kasus adalah cakupan hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan IV) pada seluruh keluarga dalam mengatasi masalah kesehatanya setelah mendapatkan asuhan keperawatan keluarga minimal 4 kali kunjungan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah keluarga rawan yang di bina memenuhi kriteria hasil akhir tingkat kemandirian keluarga (KM III dan IV) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah keluarga rawan yang di bina di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data PIS-PK, Register R1 Perkesmas, Asuhan keperawatan keluarga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Data PIS-PK, penjadwalan kunjungan, pelaksanaan kunjungan, pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan komunitas, intervensi, evaluasi, penentuan kriteria keluarga setelah selesai pembinaan tindak lanjut, monitoring, pencatatan

	dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab perkesmas

19. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Judul	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat di Desa/Kelurahan (UKGMD)
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua posyandu mendapatkan pembinaan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat di Desa/Kelurahan (UKGMD) adalah UKBM yang mendapatkan pembinaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah posyandu yang mendapatkan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh posyandu yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data posyandu, laporan bulanan kesehatan gigi dan mulut
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut

Judul	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat di SD/MI (UKGS)
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua SD/MI mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat di SD/MI (UKGS) adalah SD/MI yang mendapatkan

	pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah SD/MI yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh SD/MI yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data sekolah SD/MI, laporan bulanan kesehatan gigi dan mulut
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemeriksan kesehatan gigi dan mulut, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut

Judul	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada siswa SD/MI
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua murid SD/MI mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada siswa SD/MI adalah Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada murid SD/MI oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah murid SD/MI yang mendapatkan Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh murid SD/MI yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama

Sumber Data	Data sekolah SD/MI, data siswa, laporan bulanan kesehatan gigi dan mulut
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemeriksan kesehatan gigi dan mulut, tatalaksana, pelayanan rujukan bila perlu, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut

Judul	Penanganan siswa SD/MI yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi
Dimensi Mutu	Kuantitas dan kualitas
Tujuan	Semua murid SD/MI mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
Definisi Operasional	Penanganan siswa SD/MI yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi adalah jumlah penanganan pada siswa SD/MI yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah murid SD/MI yang mendapatkan Penanganan kesehatan gigi dan mulut di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh murid SD/MI yang membutuhkan perawatan yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data sekolah SD/MI, data siswa, laporan bulanan kesehatan gigi dan mulut
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemeriksan kesehatan gigi dan mulut, tatalaksana, pelayanan rujukan bila perlu, evaluasi, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut

20. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Judul	Pembinaan penyehat tradisional
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Semua penyehat tradisional mendapatkan pembinaan oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Definisi Operasional	Pembinaan penyehat tradisional adalah upaya yang dilakukan oleh Puskesmas berupa intervensi, identifikasi dengan aplikasi Gan Hattra, pencatatan dan pelaporan kunjungan klien serta fasilitasi rekomendasi registrasi kesehatan tradisional di wilayah kerja Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah penyehat tradisional yang di bina di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh penyehat tradisional yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kesehatan tradisional dan laporan bulan kesehatan tradisional
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pembinaan, penyuluhan Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan tradisional

Judul	Pembinaan kelompok pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Semua kelompok Tanaman Obat Keluarga (TOGA) mendapatkan pembinaan oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Definisi Operasional	Pembinaan kelompok pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah pembinaan kelompok TOGA (5-10 KK) yang dibina oleh petugas

	Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah kelompok TOGA yang di bina di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok TOGA yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kesehatan tradisional dan laporan bulan kesehatan tradisional
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pembinaan, penyuluhan Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan tradisional

21. Pelayanan Kesehatan Kerja

Judul	Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) mendapatkan pembinaan oleh petugas Puskesmas sesuai standar
Definisi Operasional	Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) adalah jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang di bina oleh petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah Pos UKK yang di bina di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh Pos UKK yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Register kesehatan Kerja, data Pos UKK dan Pekerja dan laporan bulan kesehatan kerja
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pembinaan, penyuluhan

	Pencatatan Pelaporan, Monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan kerja

22. Pelayanan Kesehatan Olahraga

Judul	Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Semua anak sekolah diperiksa kebugaran jasmaninya oleh petugas Puskesmas
Definisi Operasional	Pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah adalah persentase anak sekolah yang diperiksa kebugaran jasmaninya oleh petugas kesehatan sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah anak sekolah yang diperiksa kebugaran jasmaninya di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah anak sekolah yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data sekolah, data siswa, laporan kesehatan olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi kegiatan pembinaan, pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah, pencatatan dan pelaporan, evaluasi, pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan olahraga

Judul	Pengukuran kebugaran jasmani jema'ah haji
Dimensi Mutu	Kualitas, kesinambungan dan kemandirian
Tujuan	Semua jemaah haji diperiksa kebugaran jasmaninya oleh petugas Puskesmas
Definisi Operasional	Pengukuran kebugaran jasmani jema'ah haji adalah persentase jema'ah haji yang diperiksa

	kebugaran jasmaninya oleh petugas kesehatan sesuai standar
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap tahun
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah jema'ah haji yang diperiksa kebugaran jasmaninya di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah jema'ah haji yang ada di wilayah Puskesmas pada kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Data KBIH, data jema'ah haji, laporan kesehatan olahraga
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pembuatan jadwal pembinaan, koordinasi kegiatan pembinaan, pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah, pencatatan dan pelaporan, evaluasi, pelayanan rujukan bila diperlukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan olahraga

23. Pelayanan Kesehatan Pengembangan Lainya

Judul	Ketepatan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB
Dimensi Mutu	Kualitas dan kesinambungan
Tujuan	Meningkatkan ketepatan waktu laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB
Definisi Operasional	Ketepatan waktu laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB adalah ketepatan pengumpulah data hasil pengamatan/identifikasi penyakit potensi KLB mingguan (dengan menggunakan form W2)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah W2 yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu dalam kurun waktu satu tahun

Denominator	52 minggu
Sumber Data	Laporan W2
Target	100%
Langkah Kegiatan	pengamatan/identifikasi penyakit potensi KLB, pembuatan laporan, pengiriman laporan, evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

Judul	Kelengkapan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kelengkapan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB
Definisi Operasional	Kelengkapan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit KLB adalah kelengkapan data hasil pengamatan/identifikasi penyakit potensi KLB mingguan (dengan menggunakan form W2)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah laporan W2 yang dilaporkan Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	52 minggu
Sumber Data	Laporan W2
Target	100%
Langkah Kegiatan	pengamatan/identifikasi penyakit potensi KLB, pembuatan laporan, pengiriman laporan, evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

Judul	Ketepatan laporan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Kualitas dan kesinambungan
Tujuan	Meningkatkan Ketepatan waktu laporan surveilans terpadu penyakit
Definisi Operasional	Ketepatan laporan surveilans terpadu penyakit adalah ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan/identifikasi penyakit bulanan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan

Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	52 minggu
Sumber Data	Laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	pengamatan/identifikasi penyakit, pembuatan laporan STP, pengiriman laporan, evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

Judul	Kelengkapan laporan surveilans terpadu penyakit
Dimensi Mutu	Kualitas dan kesinambungan
Tujuan	Meningkatkan kelengkapan laporan surveilans terpadu penyakit
Definisi Operasional	Kelengkapan laporan surveilans terpadu penyakit adalah ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan/identifikasi penyakit bulanan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	52 minggu
Sumber Data	Laporan STP
Target	100%
Langkah Kegiatan	pengamatan/identifikasi penyakit, pembuatan laporan STP, pengiriman laporan, evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

Judul	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB adalah pelayanan

	kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap kejadian
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Denominator	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
Sumber Data	Formulir penyelidikan epidemologi, format lembar KIE
Target	100%
Langkah Kegiatan	Menentukan sasaran layanan kesehatan pada kondisi KLB, pelayanan kesehatan standar, rujukan bulan diperlukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

Judul	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak krisis akibat bencana
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang yang terdampak krisis akibat bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak krisis akibat bencara adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap kejadian
Periode Analisa	Setiap tahun
Numerator	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan

	akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Formulir penyelidikan epidemologi, format lembar KIE, buku pedoman penanggulangan bencana
Target	100%
Langkah Kegiatan	Menentukan sasaran layanan kesehatan pada kondisi bencana, menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar, menyiapkan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab surveilans

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SETDA

RAHMAT SUTRISNO